



MC-0 Renovasi Mandala Krida Tersendat

DPRD Desak BPKA
Segera Setujui
Pergeseran Anggaran

JOGJA - Tahapan awal renovasi Stadion Mandala Krida kembali tersendat. DPRD DIJ mendesak Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIJ segera menyetujui pergeseran anggaran agar penyusunan dokumen MC-0 dapat segera berjalan. Keterlambatan tersebut dikhawatirkan berdampak pada kepastian penggunaan stadion sebagai kandang PSIM Jogja pada musim mendatang. Ketua Komisi D DPRD DIJ Dwi Wahyu mengatakan, kajian MC-0 menjadi tahapan paling penting untuk memotret kondisi aktual Stadion Mandala Krida sebelum renovasi dilakukan. Kajian itu akan menentukan bagian bangunan yang masih layak digunakan maupun area yang harus ditutup karena alasan konstruksi.

"Harapannya MC-0 ini bisa memotret Mandala Krida, mana yang bisa dipakai dan mana yang tidak. Kalau ada bagian yang masih aman tentu bisa dimanfaatkan. Kalau ternyata tidak memungkinkan, paling tidak PSIM bisa memiliki kepastian untuk memperpanjang penggunaan Stadion Sultan Agung Bantul," ujarnya kepada wartawan, kemarin (13/7).

Komis D terus mendorong percepatan proses tersebut karena hasil MC-0 juga menjadi dasar penyusunan *detailed engineering design* (DED). Tanpa kajian awal tersebut, tahap-



SINDIRAN: Warga melintas di jembatan Bendung Mergansan yang dipasang spanduk berisi aspirasi supporter terkait kasus hukum Stadion Mandala Krida, Jogja, kemarin (13/7).

an renovasi tidak dapat dilanjutkan. Dalam APBD 2026 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk renovasi Stadion Mandala Krida. Dana tersebut terbagi sekitar Rp 640 juta untuk penyusunan MC-0 dan sekitar Rp 300 juta untuk penyusunan DED. Namun, pelaksanaan DED belum dapat dilakukan tahun ini karena harus menunggu hasil kajian MC-0. Sementara itu, penyusunan MC-0 sendiri membutuhkan uji tanah yang memerlukan pergeseran anggaran.

"Memang MC-0 tidak akan jalan kalau uji tanah ini belum beres. Makanya anggarannya harus digeser ke sana. Persoalannya sekarang masih ada perbedaan pandangan antara BPKA dan dikpora terkait mekanisme pergeseran anggaran," katanya.



apabila sebagian fasilitas masih dapat dimanfaatkan selama proses renovasi berlangsung. "Kami terus mendesak agar segera ada kejelasan. Sejah ini masih ada perbedaan pemahaman antara BPKA dengan dikpora terkait regulasi pergeseran anggaran. Ini yang menyendat proses ke depan," tegasnya.

Dwi menilai perbedaan persepsi tersebut membuat proses administrasi berjalan lambat. Padahal waktu pelaksanaan APBD Perubahan semakin sempit, sehingga dikhawatirkan menghambat seluruh tahapan renovasi. Pun, hasil MC-0 nantinya juga menjadi acuan bagi manajemen PSIM untuk menentukan area stadion yang aman digunakan.

Sementara itu, Kepala Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) DIJ Arif Hidananto mengatakan, telah menyelesaikan seluruh dokumen yang dipersyaratkan sejak Mei lalu. Seluruh berkas juga telah disampaikan kepada BPKA untuk diproses.

"Kemudian ada beberapa dokumen yang diminta untuk diperbaiki dan itu sudah kami lengkapi. Sekarang kami tinggal menunggu proses persetujuan dari BPKA," jelasnya.

Arif menegaskan, dari sisi BPO tidak ada lagi kendala administratif. Namun pelaksanaan pergeseran anggaran sepenuhnya bergantung pada persetujuan BPKA. "Kalau dari kami prosesnya sudah selesai. Tinggal menunggu persetujuan BPKA. Tanpa persetujuan itu kami tentu belum bisa melanjutkan kegiatan," imbuhnya. (bas/wia)

Lampu Hijau KPK, Buka Peluang Pemanfaatan Lagi Stadion

PERNYATAAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membuka peluang optimalisasi pemanfaatan Stadion Mandala Krida disambut positif Pemprov DIJ. Namun, BPO DIJ masih menunggu kepastian resmi tertulis terkait perubahan rekomendasi langkah lanjutan.

Kepala BPO DIJ Arif Hidananto mengatakan, telah membaca pernyataan terbaru KPK yang memperbolehkan Pemprov DIJ mengoptimalkan pemanfaatan Stadion Mandala Krida. Sinyal tersebut menjadi kabar baik bagi kelanjutan pengelolaan stadion.

"Kalau menurut saya ini hal yang positif. Tetapi untuk tindak lanjutnya tentu saya harus melaporkan dulu kepada Bapak Kepala Dinas, kemudian menunggu arahan apa yang harus dilakukan berikutnya," ujarnya saat kepada wartawan, kemarin (13/7).

Arif menjelaskan, hingga saat ini acuan resmi yang masih dimiliki BPO adalah surat terakhir dari KPK yang meminta pemprov terlebih dahulu menyusun dokumen MC-0 sebagai dasar pelaksanaan renovasi stadion. Karena itu, pihaknya menilai perlu ada kepastian secara administratif apakah pernyataan terbaru KPK tersebut sekaligus mengubah atau merevisi surat rekomendasi sebelumnya.

"Kalau menurut saya tetap perlu bersurat kepada KPK untuk meminta jawaban secara formal. Surat terakhir dari KPK kan masih memerintahkan penyusunan MC-0. Apakah dengan pernyataan hari Jumat itu berarti surat sebelumnya direvisi atau bagaimana, itu harus tertulis. Tidak cukup hanya pernyataan saja," jelasnya.

Selain itu, BPO juga masih menunggu persetujuan pergeseran anggaran dari BPKA untuk dapat dilanjutkan. "Kalau ada persetujuan dari BPKA, itu akan sangat membantu," katanya.

"Sampai saat ini proses pergeseran anggaran masih belum disetujui BPKA DIJ. Jadi kami juga belum bisa berjalan kalau itu belum disetujui," sambungnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD DIJ Dwi Wahyu menilai, pernyataan terbaru KPK memberikan kepastian yang mulai mengarah pada pemanfaatan kembali Stadion Mandala Krida. Namun, penyusunan MC-0 tetap dibutuhkan untuk menginventarisasi kondisi bangunan secara menyeluruh. Menurutnya, fungsi MC-0 bukan lagi menentukan boleh atau tidaknya stadion digunakan, melainkan memetakan bagian-bagian bangunan yang masih layak dipakai dan

area yang harus dihindari karena alasan keselamatan konstruksi.

"MC-0 nanti memotret mana yang bisa dipakai dan mana yang tidak. Ini penting supaya PSIM mengetahui area yang harus dihindari selama proses renovasi berlangsung. Harapannya tentu stadion masih bisa dimanfaatkan," katanya.

Apabila hasil kajian menunjukkan sebagian fasilitas masih aman digunakan, PSIM berpeluang kembali berkedang di Mandala Krida sebelum seluruh proses renovasi selesai. Sebaliknya, apabila seluruh area dinyatakan belum layak, maka opsi memperpanjang penggunaan Stadion Sultan Agung Bantul masih menjadi alternatif.

Terlebih, proses penyusunan MC-0 yang melibatkan tim teknis UGM juga masih memerlukan hasil uji tanah sesuai standar FIFA. Tanpa dokumen tersebut, tahapan teknis renovasi dinilai belum dapat dilanjutkan secara optimal.

"Yang terpenting sekarang semua pihak memiliki kepastian. Kalau memang ada bagian yang aman digunakan ya dimanfaatkan, kalau tidak memungkinkan paling tidak sejak awal PSIM sudah memiliki kepastian untuk menyiapkan alternatif stadion, ya, perpanjang stadion Bantul," tandasnya. (bas/wia/hep)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005